

HUBUNGAN ANTARA *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN TRANPARANSI DENGAN KINERJA PERUSAHAAN



SKRIPSI

Diajukan Untuk sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro

Disusun oleh :
INDRI HAPSARI
NIM C2C604222

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Indri Hapsari
NIM : C2C604222
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Judul Skripsi : **HUBUNGAN ANTARA *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN TRANSPARANSI DENGAN KINERJA PERUSAHAAN**
Pembimbing : Prof. Dr. H. Imam Ghozali, M.Com., Akt

Semarang, 29 November 2010

Dosen Pembimbing

(Prof.Dr.H. Imam Ghozali, M.com., Akt)

NIP.19580816 198603 1002

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Indri Hapsari

Nomor Induk Mahasiswa : C2C604222

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **HUBUNGAN ANTARA *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN TRANSPARANSI DENGAN KINERJA PERUSAHAAN**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 24 Maret 2011

Tim Penguji :

1. Prof. Dr. H. Imam Ghozali, M.Com., Akt (.....)

2. Shiddiq Nur R, SE.,M.Si.,Akt (.....)

3. Drs. A. Santosa Adiwibowo, M.Si.,Akt (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya Indri Hapsari, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : Hubungan *Good Corporate Governance* Dan Transparansi Dengan Kinerja Perusahaan, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik di sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah di berikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 15 Desember 2010
Yang membuat pernyataan,

(Indri Hapsari)
NIM : C2C604222

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the relationship between Good Corporate Governance and transparency to company performance. In this study, full disclosure and timeliness of financial report used as intervening variables in the relation between Good Corporate Governance and transparency to company performance.

The research used secondary data in form of annual report which contained financial report's company who listed in IDX website from 2006 to 2008. Sample gathered by purposive sampling method and give 139 companies for year 2006-2008. This secondary data analyzed by using double regression model which used full disclosure and timeliness as intervening variable.

The result shows that three of four items of corporate governance have no positive and significant effect to timeliness and full disclosure. Beside that, one of four items of corporate governance have a positive and significant effect to company performance. The result also shows that timeliness and full disclosure have no positive and significant effect to the relationship between Good Corporate Governance and transparency to company performance.

Keywords : Good Corporate Governance, transparency, timeliness, full disclosure, company performance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara *Good Corporate Governance* dan transparansi dengan kinerja perusahaan. Dalam penelitian ini variabel luas pengungkapan dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan berperan sebagai variabel intervening pada hubungan antara *Good Corporate Governance* dan transparansi dengan kinerja perusahaan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa annual report yang berisi laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan dalam website IDX (*Indonesian Stock Exchange*) selama tahun 2006 sampai tahun 2008. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* yang kemudian menghasilkan 139 perusahaan untuk tahun 2006-2008. Data sekunder tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode regresi berganda. Variabel luas pengungkapan dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan berperan sebagai *variable intervening* untuk memperlihatkan hubungan antara *Good Corporate Governance* dan transparansi dengan kinerja perusahaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tiga dari empat item *corporate governance* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan luas pengungkapan. Selain itu, satu dari empat item *corporate governance* berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa ketepatan waktu dan luas pengungkapan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hubungan antara *Good Corporate Governance* dan transparansi dengan kinerja perusahaan.

Kata kunci : *Good Corporate Governance*, transparansi, ketepatan waktu, luas pengungkapan, kinerja perusahaan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hubungan *Good Corporate Governance* Dan Transparansi Dengan Kinerja Perusahaan” dengan baik. Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi di Universitas Diponegoro, Jurusan Akuntansi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini penulis telah melibatkan banyak pihak yang dengan sepenuh hati memberikan bantuan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, dari hati yang paling dalam, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta, atas doa, dukungan, motivasi yang sangat berarti, serta atas pengorbanan waktu dan tenaga, kesabaran dan kasih sayang yang tiada henti.
2. Bapak Prof.Drs. H. M. NASIR, Msi, Akt,Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Imam Ghozali, M. Com., Akt. selaku dosen pembimbing dan dosen wali, yang telah membimbing dengan penuh kesabaran serta banyak memberikan saran dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.

5. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang.
6. Mas Yudi yang senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Dedy Sulistyو yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepada penulis, terima kasih untuk waktu dan tenaganya.
8. Farizdka Asmelia Wijaya, SE., Putri Medikasari Trijayanti, SE., Lundu Bontor Sihite, Edwin HB, SE., Rianika Karenina, SE., Yogi Kurniawan, sahabat yang selalu memberikan bantuan, semangat dan dorongan kepada penulis.
9. Kiki, Anin, Taufik, Andreiy yang selalu memberikan semangat.
10. Seluruh teman-teman Kelas B Jurusan Akuntansi Reguler II Angkt. 2004.
11. Kepada pihak-pihak lain yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan atas kelancaran penyusunan skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan ke depan.

Semarang, 15 Desember 2010

Indri Hapsari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
<i>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</i>	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	11
2.1.2 <i>Corporate Governance</i>	16
2.1.3 Transparansi	21
2.1.4 Kelengkapan Pengungkapan (<i>disclosure</i>).....	23
2.1.5 Ketepatan Waktu (<i>Timeliness</i>) Pelaporan Keuangan...	27
2.1.6 Kinerja Perusahaan.....	29

2.1.7	Penelitian Terdahulu	30
2.2	Kerangka Pemikiran.....	32
2.3	Pengembangan Hipotesis	32
BAB III METODE PENELITIAN		39
3.1	Jenis Penelitian.....	39
3.2	Populasi dan Prosedur Pengumpulan Sampel	39
3.3	Variabel Penelitian dan Definisi Penelitian	39
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	42
3.5	Metode Pengumpulan Data.....	43
3.6	Teknik Analisa Data.....	43
3.6.1	Uji Asumsi Klasik.....	43
3.6.2	Analisis Regresi Berganda.....	46
3.6.3	Pengujian Hipotesis.....	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		48
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	48
4.2	Analisis Data.....	49
4.2.1	Statistik Deskriptif.....	49
4.2.2	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	52
4.2.2.1	Uji Normalitas.....	52
4.2.2.2	Uji Multikolinieritas.....	59
4.2.2.3	Uji Heteroskidastisitas.....	60
4.2.2.4	Uji Autokorelasi.....	62
4.2.3	Hasil Pengujian Hipotesis.....	63

4.2.3.1 Model 1.....	63
4.2.3.2 Model 2.....	68
4.2.3.3 Model 3.....	72
4.3 Pembahasan.....	78
BAB V PENUTUP.....	85
5.1 Kesimpulan.....	85
5.2 Saran.....	87
5.3 Keterbatasan.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Masalah *corporate governance* sebenarnya muncul sejak perusahaan (dalam konteks korporat) pertama kali dibentuk. Istilah '*governance*' berasal dari bahasa latin *gubernare* yang berarti mengemudikan (*to steer*), yang mengimplikasikan bahwa *corporate governance* tidak hanya meliputi fungsi *control* namun juga fungsi *direction* (Sialaggan, 2006). Di Indonesia isu mengenai *Corporate Governance* mengemuka setelah Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan sejak tahun 1998. Sejak saat itulah pemerintah maupun investor memberikan perhatian yang lebih dalam praktik *corporate governance*.

Hubungan antara pemilik perusahaan dan manajemen merupakan paradigma hubungan *principal-agent*, dimana pemilik perusahaan sebagai *principal* mempercayakan secara formal dalam bentuk kontrak hubungan kerja kepada manajemen sebagai *agent* yang memberikan jasa manajerialnya. Kompensasi merupakan nilai jasa yang diberikan pemilik perusahaan kepada manajemen (Jensen dan Meckling, 1976).

Isu *corporate governance* dilatarbelakangi oleh *agency theory* (teori keagenan) yang menyatakan bahwa permasalahan *agency* muncul ketika kepengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya. Dewan komisaris dan direksi yang berperan sebagai agen dalam suatu perusahaan diberi kewenangan untuk mengurus jalannya perusahaan dan mengambil keputusan atas

nama pemilik. Dengan kewenangan yang dimiliki maka manajer mempunyai kemungkinan untuk tidak bertindak yang terbaik bagi kepentingan pemilik karena adanya perbedaan kepentingan (*conflict of interest*). Dengan kata lain, manajemen mempunyai kepentingan yang berbeda dengan kepentingan pemilik (Riyanto, 2003).

Ide dasar pengelolaan *agency theory* memberikan cara pandang baru mengenai *corporate governance*. Perusahaan ditunjukkan sebagai suatu hubungan kerja sama antara prinsipal (pemegang saham atau pemilik perusahaan) dan agen (manajemen). Adanya *vested interest* manajemen mengakibatkan perlunya proses *check and balance* untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh manajemen.

Mekanisme yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan bentuk pengelolaan perusahaan yang baik, dimana didalamnya tercakup suatu bentuk perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham (publik) sebagai pemilik perusahaan dan kreditor sebagai penyandang dana ekstern. Sistem *corporate governance* yang baik akan memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan kreditor untuk memperoleh kembali atas investasi dengan wajar, tepat dan seefisien mungkin, serta memastikan bahwa manajemen bertindak sebaik yang dapat dilakukannya untuk kepentingan perusahaan (*The Indonesian Institute for Corporate Governance, 2006*). Mekanisme *corporate governance* yang baik akan memberikan perlindungan kepada para pemegang

saham dan direktur untuk memperoleh kembali atas investasi dengan wajar, tepat dan seefisien mungkin serta memastikan bahwa manajemen bertindak sebaik yang dapat dilakukannya untuk kepentingan perusahaan.

Tujuan utama dari penerapan GCG adalah untuk meningkatkan nilai tambah bagi *stakeholders*. Sistem *Good Corporate Governance* menjadi rujukan untuk dijalankan oleh berbagai perusahaan-perusahaan modern di dunia. Sedangkan Clarke (1993) dalam Darmawati (2006) berpendapat bahwa *corporate governance* adalah semua upaya untuk mencari cara terbaik dalam menjalankan perusahaan, dimana kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang ada dalam *corporate governance* dapat digunakan untuk mengontrol manajemen. Target kontrol *corporate governance* adalah *control* terhadap *corporation* yang diarahkan pada pengawasan perilaku manajer agar bisa menilai apakah bermanfaat bagi perusahaan (pemilik) atau bagi manajer sendiri. Kontrol tidak diarahkan pada pengekangan kreatifitas dan potensi manajemen, tetapi lebih diarahkan pada upaya mengarahkan pengelolaan perusahaan yang terbuka (transparan) dan yang bisa dipertanggungjawabkan (*accountable*) serta terdapat proses *monitoring*, sehingga bagi pemegang saham dan investor, *good governance* memberikan jaminan bahwa mereka akan memperoleh *returns* yang memadai atas dana yang ditanamkan ke perusahaan; bagi *authority bodies*, *good governance* akan meningkatkan efisiensi dan kredibilitas pasar modal sebagai salah satu alternatif investasi yang pada gilirannya akan turut menentukan alokasi dana masyarakat ke kegiatan ekonomi yang produktif (Riyanto, 2003), sehingga secara

umum penerapan *Good Corporate Governance* dipercaya dapat meningkatkan kinerja atau nilai perusahaan (Siallagan, 2006).

Sistem *corporate governance* yang baik dapat memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan yaitu para pemegang saham, manajemen maupun kreditor. Sistem *corporate governance* terdiri dari (1) berbagai peraturan yang menjelaskan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah dan *stakeholders* yang lain; dan (2) berbagai mekanisme yang secara langsung ataupun tidak langsung menegakkan aturan tersebut atau disebut dengan mekanisme *corporate governance* internal dan eksternal (Husnan, 2000). Sedangkan prinsip *corporate* meliputi empat komponen utama yang diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan stakeholder yaitu *fairness, transparency, accountability dan responsibility*.

Penyediaan laporan keuangan beserta keluasaan dari laporan keuangan itu merupakan salah satu media untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas yang bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan tersebut bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (Baridwan, 1992). Dengan demikian ketepatanwaktuan dalam pelaporan informasi keuangan sangat dibutuhkan sebagai implementasi prinsip transparansi dari GCG yang dapat dimanfaatkan oleh pemakai informasi laporan keuangan dengan baik. Pelaporan yang tepat waktu memberikan andil bagi kinerja yang efisien dan cepat dari pasar-pasar saham di dalam pemberian harga (*pricing*) dan

fungsi evaluasi. Pelaporan yang tepat waktu membantu untuk mengurangi tingkat *insider trading*, kebocoran dan rumor di dalam pasar.

Sementara dalam pencapaian efisiensi dan sebagai sarana akuntabilitas publik, pengungkapan laporan keuangan menjadi faktor yang penting. Pengungkapan bukan hanya memberikan penjelasan atas laporan yang disajikan akan tetapi juga menyajikan informasi yang bermanfaat dalam mempelajari usaha suatu perusahaan secara menyeluruh. Pengungkapan informasi yang berkaitan dengan kegiatan suatu perusahaan bersama dengan laporan keuangan tahunan sangat penting dalam mengetahui sifat dan pengaruh kegiatan perusahaan yang pada akhirnya akan membantu dalam memprediksikan kinerja prospek perusahaan. Hal ini merupakan upaya transparansi penyebaran informasi perusahaan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Perusahaan yang telah memperoleh dana dari masyarakat dengan menjual saham di pasar modal, oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) diwajibkan untuk membuat laporan tahunan yang disajikan setransparan mungkin. Selain itu laporan keuangan dibuat dengan memiliki karakteristik : dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat dibandingkan (IAI, 1999). Dengan ketepatan waktu dalam laporan keuangan serta keluasan pengungkapan dalam laporan keuangan merupakan karakteristik yang merupakan implementasi lanjutan dari pelaksanaan GCG oleh perusahaan publik.

Penelitian mengenai hubungan *corporate governance* dengan kinerja cukup banyak dilakukan para akademisi dan peneliti. Darmawati, dkk. (2005) meneliti hubungan antara *corporate governance* dan kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan hasil survei IICG dan majalah SWA tentang

implementasi GCG di dalam perusahaan tahun 2001 dan 2002 yaitu CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) sebagai proksi variabel *corporate governance*. Sedangkan kinerja perusahaan diproksi dengan kinerja keuangan (*Return on Equity/ ROE*) dan nilai perusahaan (*Tobin's Q*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *corporate governance* secara statistik signifikan mempengaruhi ROE namun tidak mempengaruhi *Tobin's Q*.

Hastuti (2005) meneliti hubungan antara struktur *corporate governance* dengan kinerja perusahaan. Dalam penelitian tersebut digunakan struktur *corporate governance* berupa struktur kepemilikan, manajemen laba dan luas pengungkapan. Sedangkan kinerja perusahaan diproksi oleh nilai perusahaan (*Tobin's Q*). Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan positif signifikan antara luas pengungkapan dengan *Tobin's Q*. Sementara itu variabel yang lain tidak berpengaruh secara signifikan baik terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Satu penelitian di Malaysia oleh Che Haat, et.al (2008) meneliti pengaruh *corporate governance* kinerja perusahaan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam pengujian secara tidak langsung Che Haat, et.al (2008) menggunakan variabel *disclosure dan timelines* sebagai variabel mediator (*intervening*). Hasil penelitian mendapatkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara GCG dengan pengungkapan laporan keuangan maupun ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Namun demikian GCG memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Selain itu diperoleh pula bahwa pengungkapan dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja keuangan. Hasil penelitian

Che Haat et.al (2008) menjadi kontradiktif dengan konsep GCG yang mengedepankan *fairness, transparency, accountability dan responsibility*, sehingga menjadi hal yang menarik untuk dikaji ulang pada penelitian di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian ini merupakan **replikasi** dari penelitian yang dilakukan oleh Che Haat, et.al (2008). Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh *good corporate governance* dengan beberapa proksi ukuran dewan direksi, kepemilikan asing, kualitas audit, terhadap kinerja dengan luas pengungkapan laporan keuangan dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan sebagai variabel mediator di bursa efek Indonesia. Namun demikian penelitian ini menambahkan satu mekanisme GCG yaitu jumlah pertemuan komite audit untuk digunakan sebagai predictor yang tidak digunakan dalam penelitian Che Haat, et.al (2008) sebelumnya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis mengambil judul **”HUBUNGAN ANTARA *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN TRANSPARANSI DENGAN KINERJA PERUSAHAAN”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap luas pengungkapan ?
- b. Apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?

- c. Apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan ?
- d. Apakah luas pengungkapan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan ?
- e. Apakah ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai :

- a. Pengaruh *corporate governance* terhadap luas pengungkapan.
- b. Pengaruh *corporate governance* terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan.
- c. Pengaruh *corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
- d. Pengaruh luas pengungkapan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
- e. Pengaruh ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan terhadap kinerja perusahaan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan mengenai ketepatan dan keefektifan mekanisme *corporate governance* di Indonesia..

2. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para investor untuk mencermati laporan keuangan yang terdapat dalam perusahaan manufaktur terutama yang berkaitan mekanisme *corporate governance*.

4. Bagi Perusahaan

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pemegang saham dari perusahaan yang ingin mewujudkan konsep *good corporate governance*.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bagian yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini merupakan bagian awal dari isi penulisan yang menggambarkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini berisi landasan teori yang menjadi dasar untuk menjawab permasalahan yang ada. Bagian ini terdiri atas konsep atau teori yang digunakan yaitu, konsep tentang laporan keuangan, gambar kartun,

pemaknaan atas tanda, dan komunikasi. Selain itu bagian ini juga menjelaskan mengenai penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran dan hipotesis yang diajukan

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini berisi definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi dan sampel, sumber data dan teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini merupakan inti dari penelitian di mana akan menjelaskan tentang deskripsi data, analisis data dan pembuktian hipotesis yang akan dilanjutkan dengan pembahasan hasil analisis.

BAB V PENUTUP

Bagian ini merupakan bagian paling akhir yang terdiri atas kesimpulan atas hasil penelitian secara keseluruhan dan saran yang didasarkan pada kesimpulan yang telah dikemukakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan hubungan agensi sebagai suatu kontrak dibawah satu atau lebih (prinsipal) yang melibatkan orang lain (agen) untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Baik prinsipal maupun agen diasumsikan sebagai orang ekonomi yang rasional dan semata-mata termotivasi oleh kepentingan pribadi. Inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahan antara kepemilikan (di pihak prinsipal/ investor) dan pengendalian (di pihak *agent*/ manajer). Investor memiliki harapan bahwa manajer akan menghasilkan *returns* antara manajer dengan investor.

Dari asumsi yang dibangun oleh teori agensi ini, terlihat ada semangat menuduh salah satu pihak untuk mengambil kesempatan memperoleh keuntungan demi dirinya sendiri pada hubungan kerjasama. Dalam hubungan *agent-principal*, pihak agent memanfaatkan kesempatan, dan dalam hubungan pemegang saham (prinsipal) dengan pemberi pinjaman (*principal*) pihak pemegang saham yang mengambil kesempatan dari hubungan tersebut. Posisi manajemen yang sangat dominan dalam suatu perusahaan membuat manajemen sering keluar dari batas yang ditentukan dan melupakan esensi keberadaan pihak manajemen, yaitu untuk

meningkatkan kesejahteraan pemilik perusahaan (Jensen dan Meckling (1976). Konflik kepentingan (*the agent will not always act in the best interests of the principal*) tersebut memicu terjadinya biaya agensi.

Shareholder atau prinsipal, mendelegasikan pembuatan keputusan sehari-hari kepada manager atau agen. Manager ditugaskan dengan menggunakan dan mengawasi sumber-sumber ekonomi perusahaan. Bagaimanapun juga, manager tidak selalu bertindak sesuai dengan keinginan terbaik pemegang saham, sebagian dikarenakan oleh pemilihan yang kurang baik (*adverse selection*) atau adanya *moral hazard*. Oleh sebab itu pemegang saham harus memonitor manager untuk memastikan mereka telah berbuat dengan ketentuan dari isi kontrak perjanjian (Jensen dan Meckling, 1976).

Dalam hubungan antar prinsipal dan agen ini, terdapat kerugian agensi yang harus ditanggung oleh prinsipal. Dengan adanya kerugian agensi, maka akan mengurangi tingkat pengembalian prinsipal sehingga prinsipal mencoba mengawasi perusahaan secara langsung (Jensen dan Meckling, 1976). Sarana atau alat yang dapat dipakai dalam memonitor pekerjaan manager adalah melalui laporan tahunan yang keandalannya ditingkatkan dengan laporan audit. Walaupun demikian rekening-rekening tersebut dihasilkan oleh para manager yang mempunyai informasi lebih dibandingkan para pemegang saham atau auditor. Para manager mungkin menolak untuk mengungkapkan informasi pribadi karena takut informasi tersebut dapat saja digunakan untuk melawan mereka, sehingga penyimpangan tidak mungkin dideteksi atau dilaporkan kepada pemegang saham

(*assymmetric information*). Selain itu monitoring dapat menimbulkan biaya yang mana pemegang saham mungkin menolak untuk menanggungnya.

Teori keagenan berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang terjadi jika pihak-pihak yang saling bekerja sama memiliki tujuan dan pembagian kerja yang berbeda. Secara khusus teori keagenan membahas tentang adanya hubungan keagenan, dimana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*), yang melakukan pekerjaan.

Teori keagenan dilandasi oleh beberapa asumsi (Jensen dan Meckling (1976)). Asumsi-asumsi tersebut dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian dan asumsi informasi. Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri (*self-interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*) dan tidak menyukai resiko (*risk aversion*). Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektivitas dan adanya asimetri informasi antara *principal* dan *agent*. Asumsi informasi adalah bahwa informasi sebagai barang komoditi yang dapat diperjualbelikan.

Fokus dari teori ini adalah pada penentuan kontrak yang paling efisien dimana mendasari hubungan antara prinsipal dan agen. Oleh karena itu, kontrak yang baik antara investor dan manajer adalah kontrak yang mampu menjelaskan spesifikasi-spesifikasi untuk dijalankan oleh manajer dalam mengelola dana investor dan spesifikasi tentang pembagian *return* antara manajer dengan investor. Namun demikian kontrak yang lengkap akan tetap sulit diwujudkan. Dengan demikian investor diharuskan memberikan hak pengendalian residual kepada

manajer (*residual control right*) yakni hak untuk membuat keputusan dalam kondisi-kondisi tertentu yang sebelumnya belum terlihat di kontrak.

Teori keagenan berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang terjadi jika pihak-pihak yang saling bekerja sama memiliki tujuan dan pembagian kerja yang berbeda. Secara khusus teori keagenan membahas tentang adanya hubungan keagenan, dimana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) yang melakukan perkerjaan. Teori keagenan ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan (Eisenhardt, 1989 dalam Darmawati,dkk.2006). Pertama adalah masalah keagenan yang timbul pada saat (a) keinginan-keinginan atau tujuan-tujuan dari prinsipal dan agen berlawanan dan (b) merupakan suatu hal yang sulit atau mahal bagi prinsipal untuk melakukan verifikasi tentang apa yang benar-benar dilakukan oleh agen. Permasalahannya adalah bahwa prinsipal tidak dapat memverifikasi apakah agen telah melakukan sesuatu secara tepat. Kedua adalah masalah pembagian resiko yang timbul pada saat prinsipal dan agen memiliki sikap yang berbeda terhadap resiko. Dengan demikian, prinsipal dan agen mungkin memiliki preferensi tindakan yang berbeda dikarenakan adanya perbedaan preferensi resiko.

Konflik kepentingan dikarenakan oleh kemungkinan bahwa agen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan *principal* dimana hal ini memicu terjadinya biaya keagenan (*agency cost*). Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan terdapat tiga jenis biaya keagenan. *Principal* dapat membatasi divergensi dari kepentingannya dengan menetapkan insentif yang layak dan dengan mengeluarkan biaya monitoring (*monitoring cost*) yang dirancang untuk

membatasi aktivitas-aktivitas yang menyimpang dimana hal ini dilakukan oleh *agent*. Dalam beberapa situasi tertentu, agen memungkinkan untuk membelanjakan sumber daya perusahaan untuk menjamin bahwa agen tidak akan bertindak yang dapat merugikan prinsipal atau untuk meyakinkan bahwa prinsipal akan memberikan kompensasi jika dia benar-benar melakukan tindakan tersebut. Namun demikian masih bisa terjadi divergensi antara keputusan-keputusan agen dengan keputusan-keputusan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan agen. Nilai uang yang ekuivalen dengan pengurangan kesejahteraan yang dialami oleh prinsipal juga merupakan biaya yang timbul dari hubungan keagenan. Biaya sejenis ini disebut dengan kerugian residual (*residual loss*).

Berkaitan dengan masalah keagenan, *corporate governance* merupakan suatu konsep yang didasari pada teori keagenan, diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan dapat memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana kapital yang telah ditanamkan oleh investor dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer (Siregar, 2005).

2.1.2. *Corporate Governance*

Corporate governance merupakan suatu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksinya, para pemegang saham dan *stakeholders* (OECD, 1999). *Corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran (*objectives*) dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut dan sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja. *Good corporate governance* harus memberikan insentif yang tepat untuk dewan direksi dan manajemen dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan dari sisi kepentingan perusahaan dan para pemegang saham dan juga harus dapat memfasilitasi monitoring yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumberdaya secara efisien (OECD, 1999).

Secara umum terdapat empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep *corporate governance* menurut OECD yaitu :

1. Keadilan (*Fairness*). Melindungi kepentingan minoritas dan *stakeholder* lainnya dari rekayasa-rekayasa yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
2. Transparansi (*Transparency*). Meningkatkan keterbukaan (*disclosure*) dan kinerja perusahaan secara teratur dan tepat waktu (*timely basis*) serta benar (akurat) dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan.

3. Dapat dikontrol (*Accountability*). Menciptakan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan atas distribusi dan keseimbangan kekuasaan antar anggota direksi, pemegang saham, komisaris dan pengawas.
4. Tanggung Jawab (*Responsibility*). Perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan ketentuan peraturan yang berlaku termasuk tanggap terhadap lingkungan dimana perusahaan berada.

Organization for Economic Corporation and Development atau OECD (1999) menjelaskan bahwa sistem *corporate governance* terdiri dari dua hal. Pertama, berbagai peraturan tentang pengelolaan perusahaan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manager, kreditor, pemerintah dan *stakeholders* yang lain (peraturan yang menjelaskan hak dan kewajiban pihak-pihak tersebut). Kedua, berbagai mekanisme yang secara langsung ataupun tidak langsung menegakkan peraturan- peraturan tersebut.

Prinsip-prinsip *good corporate governance* yang dikembangkan OECD (1999) meliputi 5 hal sebagai berikut :

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham

Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham yaitu hak untuk (1) menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan (2) mengalihkan atau memindahkan saham yang dimilikinya (3) memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur (4) ikut berperan dan memberikan suara dalam RUPS (5) memilih anggota dewan komisaris (6) memperoleh pembagian keuntungan perusahaan

2. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham

Kerangka *corporate governance* harus menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Seluruh pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan penggantian atau perbaikan atas pelanggaran dari hak-hak mereka. Prinsip ini juga mensyaratkan adanya perlakuan yang sama atas saham-saham yang berada dalam kelas, melarang praktek-praktek – *insider trading* dan *self dealing*, dan mengharuskan anggota dewan komisaris untuk melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*)

3. Peranan *stakeholders* yang terkait dengan perusahaan

Kerangka *corporate governance* harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak stakeholder seperti ditentukan dalam UU dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan para *stakeholder* tersebut dalam rangka menciptakan kesejahteraan, lapangan pekerjaan dan kesinambungan usaha.

4. Keterbukaan dan Transparansi

Kerangka *corporate governance* harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan ini meliputi informasi mengenai keadaan keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Disamping itu, informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi.

Manajemen juga diharuskan meminta auditor eksternal melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan.

5. Akuntabilitas Dewan Komisaris (*board of directors*)

Kerangka *corporate governance* harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pementauan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Akuntabilitas Dewan Komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris beserta kewajiban-kewajiban profesionalnya kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) mengungkapkan bahwa penerapan *corporate governance* ini mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai yaitu :

- a. Meraih kembali kepercayaan investor dan kreditor nasional dan internasional
- b. Memenuhi tuntutan standar global
- c. Meminimalkan biaya kerugian dan biaya pencegahan atas penyalahgunaan wewenang oleh pengelola
- d. Meminimalkan *cost of capital* dengan menekan resiko yang dihadapi kreditor
- e. Meningkatkan nilai saham perusahaan
- f. Mengangkat citra perusahaan

Mekanisme merupakan cara kerja sesuatu secara tersistem untuk memenuhi persyaratan tertentu. Untuk meminimalkan konflik kepentingan antara

principal dan *agent* akibat adanya pemisahan pengelolaan perusahaan, diperlukan suatu cara efektif untuk mengatasi masalah ketidakselarasan kepentingan tersebut. Menurut Boediono (2005), mekanisme *corporate governance* merupakan suatu sistem yang mampu mengendalikan dan mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta pihak-pihak yang terlibat didalamnya, sehingga dapat digunakan untuk menekan terjadinya masalah keagenan..

Menurut Bernhart & Rosenstein (1998) dalam Siallagan (2006), mekanisme *corporate governance* dibagi menjadi dua kelompok. Pertama berupa *internal mechanisms* (mekanisme internal), seperti komposisi dewan direksi/komisaris, kepemilikan manajerial dan kompensasi eksekutif. Kedua, *external mechanisms* (mekanisme eksternal), seperti penguasaan oleh pasar dan *level debt financing*.

Mekanisme pengendalian lain yang secara luas digunakan dan diharapkan dapat menyelaraskan tujuan prinsipal dan agen adalah mekanisme melalui pelaporan keuangan. Melalui laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab manajer, pemilik dapat mengatur, menilai sekaligus dapat mengawasi kinerja manajer untuk mengetahui sejauh mana manajer telah bertindak untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik. Selain itu pemilik dapat memberikan kompensasi kepada manajer berdasarkan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat dengan berdasarkan angka-angka akuntansi diharapkan dapat berperan besar dalam meminimalkan konflik antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam suatu perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976; Watts dan Zimmerman, 1986 dalam Siallagan, 2006). Mekanisme internal maupun eksternal

keduanya mempunyai tujuan untuk menelaraskan hubungan antara prinsipal dan agen dengan meminimalkan konflik yang terjadi dimana disebabkan oleh *asymetry information*.

2.1.3. Transparansi

Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Perbincangan prinsip ini sendiri sangatlah menarik. Pasalnya, isu yang sering mencuat adalah pertentangan dalam menjalankan prinsip ini. Semisal, adanya kekhawatiran perusahaan bahwa jika ia terlalu terbuka, maka strateginya dapat diketahui pesaing sehingga membahayakan kelangsungan usahanya.

Menurut peraturan di pasar modal Indonesia, yang dimaksud informasi material dan relevan adalah informasi yang dapat mempengaruhi naik turunnya harga saham perusahaan tersebut, atau yang mempengaruhi secara signifikan risiko serta prospek usaha perusahaan yang bersangkutan. Mengingat definisi ini sangat normatif maka perlu ada penjelasan operasionalnya di tiap perusahaan. Karenanya, kekhawatiran di atas, sebetulnya tidak perlu muncul jika kita mampu menjabarkan kriteria informasi material secara spesifik bagi masing-masing perusahaan.

Dalam mewujudkan transparansi ini sendiri, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Setiap perusahaan,

diharapkan pula dapat mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan.

Prinsip dasar transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disajikan oleh perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan indikator-indikator yang sama. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasiskan standar akuntansi dan *best practices* yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas, mengembangkan teknologi informasi dan sistem informasi akuntansi manajemen untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh dewan komisaris dan direksi; termasuk juga mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka (Tjager dkk, 2003 : 51). Dengan kata lain prinsip transparansi ini menghendaki adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam penyajian (*disclosure*) informasi yang dimiliki perusahaan.

Sementara itu dalam bidang Pengungkapan (*Disclosure*), dapat dinilai apakah perusahaan telah:

- Menyediakan akses yang sama bagi Pemegang Saham dan analis keuangan.
- Memberikan penjelasan yang memadai mengenai risiko usaha.

- Mengungkapkan remunerasi/kompensasi Direksi dan Komisaris secara memadai.
- Mengungkapkan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
- Menyajikan hasil kinerja keuangannya dan analisa manajemen melalui internet.

2.1.4. Luas Pengungkapan (*disclosure*)

Laporan keuangan merupakan mekanisme yang penting bagi manajer untuk berkomunikasi dengan pihak investor luar, yaitu investor publik diluar lingkup manajemen serta tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Rasional yang mendasari perlunya praktek pengungkapan laporan keuangan oleh manajemen kepada pemegang saham (*stakeholder*) dijelaskan dalam hubungan *principal* dan agen. Menurut Jensen dan Meckling (1976), *agency relationship* (hubungan keagenan) ada bilamana ada satu atau lebih individu yang disebut dengan *principal* bekerja dengan individu atau organisasi lain yang disebut agen, prinsipal akan menyediakan fasilitas dan mendelegasikan kebijakan pembuat keputusan kepada agen.

Manajemen sebagai pengelola kekayaan perusahaan berperan sebagai agen, sementara investor sebagai *principal*. Prinsipal menyediakan fasilitas dan dana untuk menjalankan perusahaan, di lain pihak manajemen mempunyai kewajiban untuk mengelola apa yang diamanahkan pemegang saham kepadanya. Agen diwajibkan memberikan laporan periodik pada prinsipal tentang usaha yang

dijalankannya. Prinsipal akan menilai kinerja agennya melalui laporan keuangan yang disampaikan kepadanya. Oleh karena itu, laporan keuangan merupakan sarana akuntabilitas manajemen kepada pemilik.

Pengungkapan secara sederhana dapat diartikan sebagai pengeluaran informasi (*the release of information*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan dapat dipahami dan tidak menimbulkan salah interpretasi hanya jika laporan keuangan dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai. Pengungkapan laporan keuangan dapat dilakukan dalam bentuk penjelasan mengenai kebijakan yang ditempuh, kontijensi, metode persediaan, jumlah saham beredar, dan ukuran alternatif (misalnya pasar butir yang dicatat dalam kos historis).

Luasnya cakupan atau kelengkapan (*comprehensivness*) adalah suatu bentuk kualitas dari sebuah laporan keuangan. Imhoff dalam Simanjuntak (2004) menyatakan bahwa tingginya kualitas akuntansi sangat erat hubungannya dengan tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. Pengungkapan laporan keuangan yang memadai bisa ditempuh melalui penerapan regulasi informasi yang baik. Regulasi informasi keuangan di Indonesia dilakukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Pasar Modal, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sebagai salah satu unit dilingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) melalui Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Lembaga-lembaga ini memberlakukan regulasi informasi bagi para pelaku pasar modal. Peraturan mengenai dokumen

perusahaan yang harus diserahkan kepada Bapepam diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam No.Kep 40/PM/1997.

Keluasan pengungkapan adalah salah satu bentuk kualitas pengungkapan. Menurut Imhoff dalam Simanjuntak (2004), kualitas tampak sebagai atribut-atribut yang penting dari suatu informasi akuntansi. Meskipun kualitas akuntansi masih memiliki makna ganda (*ambiguous*) banyak peneliti yang menggunakan *index of disclosure methodology* mengemukakan bahwa kualitas pengungkapan dapat diukur dan digunakan untuk menilai manfaat potensial dari isi suatu laporan tahunan. Dengan kata lain Imhoff menyatakan bahwa tingginya kualitas informasi akuntansi sangat berkaitan dengan tingkat kelengkapan pengungkapan.

Ada perbedaan pendapat dalam hal sejauh mana luas pengungkapan laporan keuangan seharusnya dilakukan karena kepentingan dan kebutuhan informasi pihak pengguna berbeda. Ada tiga konsep mengenai luas pengungkapan laporan keuangan, yaitu :

a) *Adequated disclosure* (pengungkapan cukup)

Konsep yang paling sering dipraktekkan adalah pengungkapan yang cukup, yaitu pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, dimana angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor.

b) *Fair disclosure* (pengungkapan wajar)

Pengungkapan yang wajar secara tidak langsung merupakan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan keuangan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial.

c) *Full disclosure* (pengungkapan penuh)

Pengungkapan penuh menyangkut kelengkapan penyajian informasi yang diungkap secara relevan. Pengungkapan penuh memiliki kesan penyajian informasi secara melimpah sehingga beberapa pihak menganggapnya tidak baik (Na'im dan Rakhman:2000 dalam Simanjuntak (2004))

Sementara itu ada dua jenis pengungkapan laporan keuangan dalam hubungannya dengan syarat yang ditetapkan oleh standar akuntansi keuangan, yaitu:

a) Pengungkapan wajib (*mandated disclosure*)

Pengungkapan wajib yaitu pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Perusahaan memperoleh manfaat dari menyembunyikan, sementara yang lain dengan mengungkapkan informasi. Jika perusahaan tidak bersedia untuk mengungkapkan secara sukarela maka pengungkapan wajib akan memaksa perusahaan untuk mengungkapkannya.

b) Pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*)

Pengungkapan sukarela yaitu pengungkapan butir-butir yang dilakukan sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Healy dan Palepu (2001) mengemukakan meskipun semua perusahaan publik diwajibkan untuk memenuhi pengungkapan minimum, mereka berbeda secara substantial dalam hal jumlah tambahan informasi yang diungkap ke pasar modal. Salah satu cara meningkatkan kredibilitas perusahaan adalah melalui pengungkapan sukarela secara lebih luas dan membantu investor dalam memahami strategi bisnis manajemen. Perusahaan dapat menarik perhatian

lebih banyak analisis, meningkatkan akurasi ekspektasi pasar, menurunkan ketidaksimetrisan informasi pasar dan menurunkan kejutan pasar (*market surprise*) dengan melakukan pengungkapan yang lebih luas (Lang dan Lundholm, 1996 dalam Simanjuntak (2004)). Lebih lanjut Lang dan Lundholm menyatakan bahwa analisis yang mengikuti perkembangan perusahaan akan meningkat sejalan dengan praktek pengungkapan yang lebih informatif. Kebijakan pengungkapan dengan kualitas informasi yang rendah justru akan meningkatkan perilaku yang oportunistik dalam pasar modal.

2.1.5. Ketepatanwaktuan (*Timeliness*) Pelaporan Keuangan

Timeliness didefinisikan sebagai suatu pemanfaatan informasi oleh pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitas atau kemampuannya untuk mengambil keputusan. Menurut Ang (1997) informasi yang tepat waktu berarti jangan sampai informasi yang disampaikan sudah basi atau sudah menjadi rahasia umum. Baridwan (1992) tepat waktu diartikan bahwa informasi harus disampaikan sedini mungkin untuk dapat digunakan sebagai dasar untuk membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.

Ketepatan waktu tidak menjamin relevansi, tetapi relevansi tidaklah mungkin tanpa ketepatan waktu. Informasi mengenai kondisi dan posisi perusahaan harus secara cepat dan tepat waktu sampai ke pemakai laporan keuangan. Ketepatan waktu mengimplikasikan bahwa laporan keuangan seharusnya disajikan pada suatu interval waktu, untuk menjelaskan perubahan

dalam perusahaan yang akan mempengaruhi pemakai informasi dalam membuat prediksi dan keputusan.

Selanjutnya informasi tepat waktu akan mempengaruhi kemampuan manajemen dalam merespon setiap kejadian atau permasalahan. Apabila informasi itu tidak disampaikan dengan tepat waktu akan menyebabkan informasi tersebut kehilangan nilai di dalam mempengaruhi kualitas keputusan. Informasi tepat waktu juga akan mendukung manajer menghadapi ketidakpastian yang terjadi dalam lingkungan kerja mereka.

Menurut Dyer dan McHugh (1975) dalam penelitiannya menyatakan bahwa banyak pihak percaya ketepatan waktu laporan merupakan karakteristik penting bagi laporan keuangan itu sendiri, pihak-pihak tersebut misalnya akuntan, manajer dan analis keuangan. Lebih lanjut ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan elemen pokok bagi catatan laporan keuangan yang memadai.

Ketepatan waktu pelaporan merupakan fungsi dari faktor-faktor yang bersifat spesifik bagi perusahaan dan audit yang terkait. Faktor-faktor audit yang terkait adalah faktor-faktor yang cenderung menghambat (atau membantu) auditor dalam pelaksanaan tugas audit dan pengeluaran laporan audit secara tepat. Sebaliknya, faktor-faktor yang bersifat spesifik bagi perusahaan adalah faktor-faktor yang memungkinkan manajemen untuk menghasilkan laporan tahunan yang lebih tepat waktu atau mengurangi biaya yang berkaitan dengan penundaan yang belum disesuaikan dalam pelaporan.

2.1.6. Kinerja Perusahaan

Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Siallagan, 2006). Pengukuran kinerja dapat berupa pengukuran keuangan dan non keuangan. Pengukuran keuangan dinyatakan dalam ketentuan moneter. Penilaian kinerja perusahaan dapat dilihat dari segi analisis laporan keuangan berupa rasio keuangan dan dari segi perubahan harga saham. Nilai perusahaan akan tercermin dari harga pasar sahamnya (Darmawati, 2006).

Rasio nilai pasar perusahaan memberikan indikasi bagi manajemen mengenai penilaian investor terhadap kinerja perusahaan di masa lampau dan prospeknya di masa yang akan datang. Ada beberapa rasio untuk mengukur nilai pasar perusahaan, misalnya *price earning ratio* (PER), *market-to-book ratio* dan *Tobin's Q*. Masing-masing ratio memiliki karakteristik yang berbeda dan memberikan informasi bagi manajemen maupun investor mengenai hal yang berbeda pula. Salah satu rasio yang dapat memberikan informasi paling baik adalah *Tobin's Q*. Rasio ini bisa menjelaskan berbagai fenomena dalam kegiatan suatu perusahaan seperti misalnya terjadi perbedaan dalam pengambilan keputusan investasi dan diversifikasi, hubungan antara kepemilikan saham manajemen dan nilai perusahaan, hubungan antara kinerja manajemen dengan keuntungan dalam akuisisi dan kebijakan pendanaan, deviden dan kompensasi

(Darmawati, 2006). *Tobin's Q* merupakan ukuran penilaian yang paling banyak digunakan dalam data keuangan perusahaan.

2.1.6. Penelitian Terdahulu

1. Darmawati,dkk (2003) meneliti hubungan antara *corporate governance* dan kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan hasil survei IICG dan majalah SWA tentang implementasi GCG didalam perusahaan tahun 2001 dan 2002 yaitu CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) sebagai proksi variabel *corporate governance*. Sedangkan kinerja perusahaan diproksi oleh kinerja keuangan (*Return on Equity/ ROE*) dan nilai perusahaan (*Tobin's Q*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *corporate governance* secara statistik signifikan mempengaruhi ROE namun tidak mempengaruhi *Tobin's Q*.
2. Siallagan dan Machfoedz (2006) meneliti hubungan diantara mekanisme *corporate governance* dan kualitas laba, kualitas laba dan nilai perusahaan, mekanisme *corporate governance* dan nilai perusahaan, serta apakah kualitas laba berperan menjadi variabel *intervening* diantara *corporate governance* dan nilai perusahaan. Mekanisme *corporate governance* yang dipakai terdiri dari kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan komite audit. Kualitas laba diproksikan dengan *discretionary accruals*, sedangkan nilai perusahaan diproksikan dengan *Tobin's Q*. Hasil yang didapat adalah:
(1) Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kualitas laba; dewan komisaris secara negatif berpengaruh terhadap kualitas laba; dan komite audit secara positif berpengaruh terhadap kualitas laba. (2) Kualitas laba secara positif berpengaruh terhadap nilai perusahaan. (3) Kepemilikan manajerial

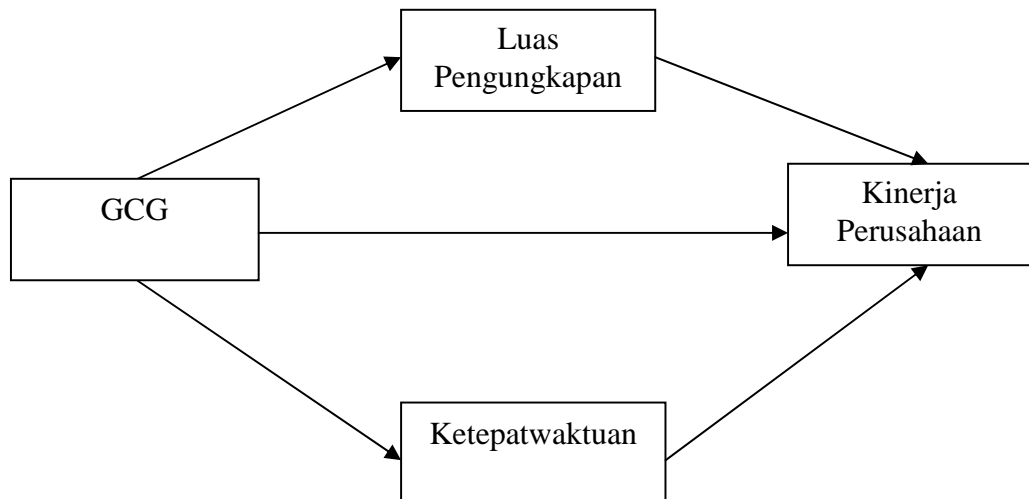
berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, sementara dewan komisaris dan komite audit secara positif berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

(4) Kualitas laba bukan merupakan variabel *intervening* antara mekanisme CG dan nilai perusahaan.

3. Hastuti (2005) meneliti hubungan diantara *Good corporate governance* dan struktur kepemilikan dengan nilai perusahaan. *Good corporate governance* yang dipakai terdiri dari tindakan manajemen laba dan luas pengungkapan, sedangkan nilai perusahaan diprosikan dengan *Tobin's Q*. Hasil yang didapat adalah: (1) Struktur kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (2) pengungkapan secara positif berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. (3) manajemen laba tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
4. Che Haat, dan Abdul Rahman, 2008 meneliti hubungan antara corporate governance, pengungkapan, ketepatanwaktuan penyampaian laporan keuangan dan kinerja perusahaan pada perusahaan-perusahaan di Malaysia. Hasil penelitian mendapatkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara GCG dengan pengungkapan laporan keuangan maupun ketepatanwaktuan penyampaian laporan keuangan. Namun demikian GCG memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Selain itu diperoleh pula bahwa pengungkapan dan ketepatanwaktuan penyampaian laporan keuangan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja keuangan.

2.2. Kerangka Pemikiran

Gambar 1
Kerangka Pemikiran Penelitian



2.3. Pengembangan Hipotesis

1. GCG dengan Transparansi (Luas Pengungkapan dan Ketepatanwaktuan)

Bukti empiris menunjukkan bahwa pengungkapan memiliki pengaruh material terhadap biaya modal (Che Haat, et.al 2008). Pengungkapan yang lebih luas dan pelaporan yang tepat waktu akan mengurangi biaya ekuitas melalui biaya transaksi yang lebih rendah, mengurangi kesalahan prediksi laba atau permintaan yang lebih tinggi terhadap sekuritas perusahaan (Che Haat, 2008). Manfaat lain dari pengungkapan yang lebih luas adalah mengurangi masalah asimetri informasi, dengan mengilangkan arah kejutan periodic dari kinerja perusahaan dan membuat harga saham tidak terlalu *volatile* (Lanmg dan Kunghiolm dalam Che Haat, *et.al*, 2008).

Penguatan GCG dan praktik pelaporan dari laporan keuangan dan kredibilitas laporan keuangan akan memberikan hasil tidak hanya dalam mengeliminasi kegagalan bisnis secara total, namun juga memberikan tanda pada pemegang saham khususnya sebagai regulator. Penelitian sebelumnya mendapatkan bahwa tingkat transparansi (melalui pengungkapan dan ketepatanwaktuan) dipertimbangkan sebagai hasil yang baik dari praktik CG yang dapat membantu menghilangkan masalah asimetri informasi antara pemegang saham luar dengan manajemen.

Keberadaan komite audit ditemukan bergubungan dengan kualitas laporan keuangan (McMullen dalam Li, et.al, 2008). Ho dan Wong dalam Li, et.al mendapatkan bahwa keberadaan komite audit dapat meningkatkan kualitas pengungkapan laporan keuangan. Namun demikian komite audit yang tidak aktif tidak mampu mengawasi manajemen secara efektif dan waktu pertemuan yang cukup harus dilakukan untuk membahas pertimbangan dari masalah-masalah utama Olson, 1999). Price Waterhouse (1993) merekomendasikan bahwa komite audit minimum harus melakukan sebanyak 3 atau 4 kali pertemuan dalam satu tahun dan pertemuan khusus jika diperlukan.

Dengan demikian dalam kaitannya antara mekanisme corporate governance dengan transparansi, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_{1a}: Mekanisme GCG berupa mekanis internal (kepemilikan saham manajerial/INSIDER) yang lebih kuat berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan yang lebih luas.

H_{1b}: Mekanisme GCG berupa mekanisme pendanaan kepemilikan asing yang lebih kuat berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan yang lebih luas.

H_{1c}: Mekanisme GCG berupa mekanisme kualitas audit yang lebih baik berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan yang lebih luas.

H_{1d}: Mekanisme GCG berupa pertemuan komite audit yang lebih banyak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan yang lebih luas.

H_{2a}: Mekanisme GCG berupa mekanis internal (kepemilikan saham manajerial/INSIDER) yang lebih kuat berpengaruh terhadap waktu pelaporan yang lebih cepat.

H_{2b}: Mekanisme GCG berupa mekanisme pendanaan kepemilikan asing yang lebih kuat berpengaruh terhadap waktu pelaporan yang lebih cepat.

H_{2c}: Mekanisme GCG berupa mekanisme kualitas audit yang lebih baik berpengaruh terhadap waktu pelaporan yang lebih cepat.

H_{2d}: Mekanisme GCG berupa mekanisme pertemuan komite audit yang lebih banyak berpengaruh terhadap waktu pelaporan yang lebih cepat.

2. GCG dengan Kinerja

Mekanisme GCG menjamin investor dalam perusahaan menerima return yang cukup atas investasi mereka (Shelier dan Vushny dalam Che Haat, et.al, 2008). Jika mekanisme ini tidak ada dan tidak berfungsi dengan benar maka investor tidak akan merasakan bahwa mereka mendanai perusahaan atau membeli ekuitas sekuritas perusahaan. Secara keseluruhan, kinerja ekonomis akan menderita karena banyak kesempatan bisnis akan hilang dan masalah keuangan secara temporer akan menyebar dengan cepat kepada perusahaan lain, karyawan

dan konsumen. Jika ekspropriasi yang dilakukan oleh para manajer meningkat pada saat tingkat kembalian investasi yang diharapkan oleh investor jatuh, maka *shock* yang diakibatkan dari menurunnya tingkat kepercayaan investor akan mendorong terjadinya penurunan *capital inflow* dan meningkatnya *capital outflows* dari suatu negara. Akibat selanjutnya adalah menurunnya harga saham dan nilai tukar mata uang negara yang bersangkutan (Darmawati, 2003).

Melalui pengaruhnya terhadap perkembangan pasar modal, proteksi investor dapat mempengaruhi perekonomian riil. Menurut Beck dkk (dalam Darmawati, 2005), perkembangan dalam bidang keuangan dari suatu negara dapat mempercepat pertumbuhan dengan tiga cara. Pertama, meningkatkan tabungan (*savings*). Kedua, menanamkan tabungan tersebut ke dalam investasi riil, sehingga bisa mempercepat akumulasi kapital. Ketiga, dengan luasnya pengendalian keputusan-keputusan investasi yang dimiliki oleh pihak-pihak institusi keuangan, maka perkembangan dalam bidang keuangan tersebut akan mendorong aliran modal ke arah penggunaan yang lebih produktif, sehingga bisa meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya. Ketiga hal tersebut akan mempunyai dampak besar terhadap pertumbuhan perekonomian dalam suatu negara. Beberapa penelitian telah membuktikan adanya hubungan perkembangan di bidang keuangan dengan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian sebelumnya juga mendapatkan bahwa GCG memiliki hubungan positif dengan kinerja. Black dkk. (dalam Darmawati, 2005) memberikan bukti bahwa *corporate governance* merupakan faktor penting dalam menjelaskan nilai perusahaan-perusahaan publik di Korea. Klapper dan Love (dalam Darmawati,

2005) menemukan adanya hubungan positif antara *corporate governance* dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan *return on assets* (ROA) dan *Tobin's Q*. Penemuan penting lainnya dari penelitian mereka adalah bahwa penerapan *corporate governance* di tingkat perusahaan lebih memiliki arti dalam negara berkembang dibandingkan dalam negara maju. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan *corporate governance* yang baik akan memperoleh manfaat yang lebih besar di negara-negara yang lingkungan hukumnya buruk. Mitton (dalam Darmawati, 2005) menunjukkan bahwa variabel-variabel yang berkaitan dengan *corporate governance* mempunyai dampak yang kuat terhadap kinerja perusahaan selama periode krisis di Asia Timur (tahun 1997 sampai dengan tahun 1998).

Mekanisme GCG yang baik juga menekankan pada pengawasan yang baik terhadap manajemen. Keberadaan dewan komisaris dan komite audit akan menentukan tingkat pengawasan terhadap aktivitas manajemen. Pengawasan terhadap dewan direksi merupakan sebuah fungsi yang tidak hanya secara bentuk dan komposisi dari dewan komisari maupun komite audit namun juga sub komite dimana banyak proses dan keputusan penting yang diambil dinobutor dan diambil (Cotter dan Silvester dalam Li, et.al, 2008).

Peran dari komite audit telah berkembang dari adanya pertempuan dan tantangan dalam mengubah lingkungan bisnis, sosial dan ekonomi. The Smith Report (2003) di Inggris telah mengidentifikasi peran dari komite audit sebagai yang menjamin bahwa interes dari pemegang saham dapat dilindungi dalam kaitannya adengan laporan keuangan dan kontrol internal. Komite audit yang

efektif dapat meningkatkan kontrol internal dan bertindak dalam memperkecil biaya keagenan (Ho dan Wong dalam Li, et.al, 2008), dan merupakan perangkat pengawasan yang kuat untuk meningkatkan pengungkapan laporan keuangan. Keberadaan komite audit ditemukan bergubungan dengan kuitas laporan keuangan (McMullen dalam Li, et.al, 2008).

Dalam penelitian Che Haat, *et.al*, mekanisme *corporate governance* diukur dengan menggunakan beberapa proksi seperti mekanisme internal seperti kepemilikan saham manajerial (INSIDER), struktur pendanaan (kepemilikan asing dan dan debt to aset) serta kualitas audit. Penelitian Li, et.al selain menggunakan aspek kepemilikan juga menggunakan aktivitas pertemuan komite audit sebagai bagian dari mekanisme *corporate governance*.

Dengan demikian dalam kaitannya antara mekanisme *corporate governance* dengan kinerja perusahaan, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

- H_{3a}: Mekanisme GCG berupa mekanis internal (kepemilikan saham manajerial/INSIDER) yang lebih kuat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang lebih tinggi.
- H_{3b}: Mekanisme GCG berupa mekanisme pendanaan kepemilikan asing yang lebih kuat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang lebih tinggi.
- H_{3c}: Mekanisme GCG berupa mekanisme kualitas audit yang lebih baik berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang lebih tinggi.
- H_{3d}: Mekanisme GCG berupa jumlah pertemuan komite audit yang lebih banyak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang lebih tinggi.

3. Hubungan antara Transparansi (Luas Pengungkapan dan Ketepatanwaktuan) dengan Kinerja Perusahaan

Corporate governance memiliki pengaruh pada tingkat pengungkapan (Haniffa dan Cooke dalam Che Haat, et.al 2002) begitu pula pada ketepatan waktu pelaporan, khususnya pada dewan direktur yang mengatur pengungkapan informasi dalam laporan. Dengan demikian mengacu pada teori agensi, ketika dewan direksi bersifat independent dari manajemen dan mengobservasikan tanggung jawab mereka untuk menjadi akuntabel dan transparan bagi para *shareholder* atau *stakeholder*, mereka akan mengungkapkan semua informasi yang relevan tepat pada waktunya, tidak hanya menjadi mandate saja tetapi juga item-item sukarelanya.

Adanya hubungan antara transparansi dan kinerja, dengan meningkatkan pengungkapan sukarela dan pelaporan yang lebih tepat waktu menghasilkan transparansi yang lebih tinggi. (Loh, dalam Che Haat, 2008) menemukan bahwa perusahaan mungkin memperoleh sejumlah keuntungan, termasuk pengelolaan perusahaan yang lebih baik, meningkatkan kredibilitas manajemen, investor jangka panjang yang lebih banyak, analisis lebih lanjut yang lebih banyak, perbaikan akses atas modal dan biaya modal yang lebih rendah, dan realisasi mendasar perusahaan yang sebenarnya.

Dengan demikian dalam kaitannya antara mekanisme transparansi dengan kinerja, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₄: Penyampaian laporan keuangan yang lebih cepat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang lebih tinggi.

H₅: Pengungkapan yang lebih luas berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang lebih tinggi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian eksplanatori merupakan penelitian penjelasan atau penelitian untuk menguji dugaan sementara (hipotesis). Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang memerlukan pengujian secara statistik.

3.2 Populasi dan Prosedur Pengumpulan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2006-2008. Sampel penelitian ini diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan kriteia sebagai berikut :

1. Terdaftar sebagai perusahaan publik yang tercatat pada tahun 2006-2008 di Bursa Efek Indonesia dan yang mempublikasikan Laporan Tahunan secara konsisten dari tahun 2006-2008
2. Perusahaan yang dipilih adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki kepemilikan kepemilikan manajerial.

3.3. Variabel Penelitian dan Definisi Penelitian

1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam menjalankan

operasionalnya. Penelitian kinerja perusahaan dapat dilihat dari segi analisis laporan keuangan berupa resiko keuangan dan dari segi perubahan harga saham. Pada penelitian ini, kinerja perusahaan diproksi dengan nilai perusahaan. Nilai perusahaan diukur dengan *Tobin's Q*. *Tobin's Q* dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut

$$\text{Tobin's } q = (\text{MVE} + \text{DEBT}) / \text{TA}$$

Dimana : MVE = Market Value of Equity

$$= \text{Harga per lembar saham} \times \text{Jumlah saham beredar}$$

$$\text{DEBT} = \text{Total hutang}$$

$$\text{TA} = \text{total aset}$$

2. Variabel Independen Penelitian

Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Mekanisme GCG meliputi

a. Mekanisme internal

Mekanisme internal diukur dengan struktur kepemilikan saham oleh manajerial (INSIDER).

b. Mekanisme Pendanaan

Mekanisme Pendanaan diukur dengan menggunakan proporsi saham yang dimiliki oleh pihak asing

c. Mekanisme Audit

Mekanisme Audit diukur dengan menggunakan kualitas audit dengan 0 jika perusahaan diaudit oleh KAP Non Big 4 dan 1 jika perusahaan diaudit oleh KAP big 4.

d. Mekanisme aktivitas pertemuan komite Audit

Mekanisme aktivitas pertemuan komite Audit diukur dengan menggunakan jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite audit dalam 1 tahun.

3. Variabel Intervening

Variabel intervening atau perantara dalam penelitian ini adalah meliputi :

a. Luas pengungkapan

Dalam melakukan penghitungan angka indeks, peneliti menggunakan instrumen yang digunakan Wallace dalam Hastuti (2005). Instrumen ini memberi angka tambahan pada setiap pengungkapan butir yang material. Semakin banyak butir yang diungkap oleh perusahaan, semakin banyak pula angka indeks yang diperoleh perusahaan tersebut. Perusahaan dengan angka indeks yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut melakukan praktek pengungkapan secara lebih komprehensif relatif dibandingkan perusahaan lain.

Angka indeks maksimum dalam instrumen ini adalah satu. Perusahaan yang memiliki angka indeks satu menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan pengungkapan laporan keuangan secara penuh. Perhitungan untuk mencari angka indeks ditentukan dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Indeks} = \frac{n}{K}$$

Dimana :

n = jumlah butir pengungkapan yang dipenuhi

K = jumlah semua butir yang mungkin dipenuhi

b. Ketepatanwaktuan Penyampaian

Ketepatanwaktuan adalah lama hari penyajian laporan keuangan pada
kepad publik sejak tahun buku berakhir (31 Desember).

3.4. Jenis dan Sumber Data

Pengertian dari data adalah sesuatu yang diketahui atau dianggap mempunyai sifat dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Dalam penulisan ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang diambil dari catatan atau sumber lain yang telah ada sebelumnya. Data sekunder juga dapat diartikan sebagai data yang sebelumnya telah ditulis atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kepemilikan institusional, komisaris independent, ukuran dewan direksi, *debt to equity*, ukuran dewan direksi, total hutang, total aktiva, harga saham penutupan akhir tahun dan jumlah saham yang beredar akhir tahun. Data diperoleh dari laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan di BEI, *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD) dan www.jsx.co.id serta *annual report*

3.5. Metode Pengumpulan Data

Data menurut sumbernya dapat diklasifikasikan dalam data internal, data eksternal, data primer dan data sekunder. Data skunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari *Indonesian Capital Market Directory* dan Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM) BEI.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder berupa laporan keuangan (*annual report*) meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal periode tahun buku 2005-2007 pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI.

3.6. Teknik Analisa Data

3.6.1. Uji Asumsi klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi penelitian yang dilakukan normalitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas terhadap masing-masing faktor.

1. Uji Normalitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

2. Pengujian Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika teruji korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya (Ghozali:2001).

Untuk mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model regresi maka dilakukan pengujian Durbin-Watson (DW test) dengan mengambil keputusan sebagai berikut:

- $du < DW < 4 - du$ tidak terjadi autokorelasi
- $dl < DW < du$ atau $(4-du) < DW < (4-dl)$ tidak dapat disimpulkan
- $DW < dl$ atau $DW > 4 - dl$ terjadi autokorelasi.

3. Pengujian Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (variabel bebas). Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antara sesama variabel bebas sama dengan nol.

Dalam penelitian ini pengujian multikolinearitas dengan bantuan SPSS (Statistical Package for Social Science) dapat dilihat dari nilai variance inflation factor (VIF) dan/atau tolerance value pada perhitungan collinearity diagnostics. Variabel independen mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel independen yang lain jika nilai VIF lebih besar dari 10 dan/atau maka tolerance value lebih kecil dari 0,10. apabila terjadi multikolinearitas, maka variabel independen yang mengandung multikolinearitas harus dikeluarkan dari persamaan regresi.

4. Pengujian Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2001).

Untuk menguji kemungkinan terjadinya heteroskedastisitas dengan dideteksi dengan melihat adanya tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara nilai yang telah diprediksi dengan kuadrat dari nilai residual (Y prediksi – Y sesungguhnya). Jika titik-titik grafik membentuk suatu pola tertentu (gelombang, melebar kemudian menyempit), maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Jika titik-titik grafik tidak menunjukkan pola yang jelas atau bersifat acak, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y , maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Selain itu hasil pengamatan visual erhadap scatterplt, indikasi terpenuhinya asumsi homoskedastisitas dapat juga diuji dengan menggunakan metode Gletser yaitu dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel bebas. Bila hasil regresi tersebut signifikan (dibawah 0,05) maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas dan sebaliknya bila tidak signifikan maka asumsi homoskedastisitas dipenuhi.

3.6.2. Analisis Regresi Berganda

Tujuan utama dilakukanya analisis regresi berganda adalah untuk mengukur besarnya pengaruh secara kuantitatif dan kualitatif dari perubahan variabel dependen atas dasar nilai variabel independen.

Penelitian ini menggunakan 3 model analisis yaitu sebagai berikut :

$$\text{DISC} = a + b_1 \text{INSIDER} + b_2 \text{FORIEGN} + b_3 \text{KA} + b_4 \text{MEET} + e_1$$

$$\text{TMLNS} = a + b_1 \text{INSIDER} + b_2 \text{FORIEGN} + b_3 \text{KA} + b_4 \text{MEET} + e_2$$

$$\begin{aligned} \text{Q} &= a + b_1 \text{INSIDER} + b_2 \text{FORIEGN} + b_3 \text{KA} + b_4 \text{MEET} + b_5 \text{DISC} \\ &+ b_6 \text{TMLNS} + e_3 \end{aligned}$$

3.6.3. Pengujian Hipotesis

- a. Uji F digunakan untuk menguji hipotesis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Jika signifikansi F lebih kecil dari taraf signifikansi 5% maka variabel independen berpengaruh signifikan secara bersama-sama. Sebaliknya jika nilai signifikansi F lebih besar dari taraf signifikansi 5% maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan.

- b. Uji t adalah untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Jika signifikansi t lebih kecil dari taraf signifikansi 5% maka variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya. Jika signifikansi t lebih besar dari taraf signifikansi 5% maka variabel bebas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya.
- c. Uji R square (adjusted R^2) untuk mengetahui sampai seberapa besar prosentase variasi variabel bebas pada model dapat diterangkan oleh variabel terikat (Ghozali, 2001). Nilai koefisien determinasi (R^2) adalah di antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil atau di bawah 0,5 berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Sebaliknya nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.